

LAPORAN KEUANGAN POKOK
KOMISI YUDISIAL RI
TAHUN ANGGARAN 2015
(AUDITED)



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
JL.Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat
Telp.021 3905455 Fax.021 3906215, PO BOX 2685

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Yudisial RI adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (Audited).

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI (Audited) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Yudisial RI. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 18 April 2016
Sekretaris Jenderal,



Danang Wijayanto
NIP. 19620402 198203 1 001

DAFTAR ISI

KETERANGAN	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Pernyataan Telah Direviu	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3. Basis Akuntansi	9
A.4. Dasar Pengukuran	9
A.5. Kebijakan Akuntansi	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1. Pendapatan	18
B.2. Belanja	20
B.3. Belanja Pegawai	20
B.4. Belanja Barang	22
B.5. Belanja Modal	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	25
C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	25
C.3. Belanja dibayar Dimuka	26
C.4. Piutang Bukan Pajak	28
C.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih	29
C.6. Persediaan	31
C.7. Tanah	32
C.8. Peralatan dan Mesin	32
C.9. Gedung dan Bangunan	36
C.10. Jalan, Irigasi dan Jaringan	37
C.11. Aset Tetap Lainnya	37
C.12. KDP	38
C.13. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	38
C.14. Aset Tak Berwujud	39

KETERANGAN	Halaman
C.15. Aset Lain-lain	39
C.16. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	40
C.17. Utang Kepada Pihak Ketiga	40
C.18. Pendapatan Diterima Dimuka	41
C.19. Utang Jangka Pendek Lainnya	42
C.20. Ekuitas	42
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	
D.1. PNBP	43
D.2. Beban Pegawai	44
D.3. Beban Persediaan	45
D.4. Beban Barang dan Jasa	45
D.5. Beban Pemeliharaan	46
D.6. Beban Perjalanan Dinas	47
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	48
D.8. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	48
D.9. Beban Pelepasan Aset Non Lancar	49
D.10. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	49
D.11. Surplus / Defisit - LO	49
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1. Ekuitas Awal	50
E.2. Surplus (Defisit) LO	50
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	50
E.4. Ekuitas Akhir	51
F. Pengungkapan Penting Lainnya	52



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 18 April 2016
Sekretaris Jenderal,

Danang Wijayanto
NIP.19620402 198203 1 001 b



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telp. (021) 3905455, Fax (021) 3905454 www.komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL RI TAHUN ANGGARAN 2015

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI untuk Tahun Anggaran 2015 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2015, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Komisi Yudisial RI

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 25 Februari 2016
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,

Ronny Dolfinus Tulak
NIP 195907021987031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI 31 Desember 2015 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada per 31 Desember 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp364.360.735,00 atau mencapai 466,19 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp78.157.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp118.288.383.445,00 atau mencapai 92,19 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp128.307.826.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp125.163.735.256,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.365.390.253,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp121.079.324.205,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.719.020.798,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp237.665.561,00 dan Rp124.926.069.695,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp145.209.092,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp116.216.121.916,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp116.070.912.824,00). Kegiatan Non Operasional surplus sebesar

Rp7.807.183,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp116.063.105.641,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp121.341.393.923,00 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp116.063.105.641,00) ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kesalahan Mendasar sebesar (Rp2.193.381,00) kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp119.649.974.794,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp124.926.069.695,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2015			31 DESEMBER 2014
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	78.157.000,00	364.360.735,00	466,19	195.308.428,00
Jumlah Pendapatan	78.157.000,00	364.360.735,00	466,19	195.308.428,00
BELANJA				
1. Belanja Pegawai	22.249.926.000,00	19.719.620.825,00	88,63	14.313.904.560,00
2. Belanja Barang	98.117.185.000,00	91.434.247.447,00	93,19	59.076.072.149,00
3. Belanja Modal	7.940.715.000,00	7.134.515.173,00	89,85	2.278.175.475,00
Jumlah Belanja	128.307.826.000,00	118.288.383.445,00	92,19	75.668.152.184,00

II. NERACA

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

NAMA AKUN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Aset				
Aset Lancar				
Kas di Bendahara				
Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara				
Kas	0,00	35.764.346,00	(35.764.346,00)	(100,00)
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	674.113.259,00	562.100.085,00	112.013.174,00	19,92
Piutang Bukan Pajak	4.198.210.301,00	4.198.210.301,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(4.198.210.301,00)	(4.198.210.301,00)	0,00	0,00
Persediaan	691.276.994,00	449.248.534,00	242.028.460,00	53,87
Jumlah Aset Lancar	1.365.390.253,00	1.047.112.965,00	318.277.288,00	30,39
Aset Tetap				
Tanah	47.188.389.400,00	47.188.389.400,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	44.285.005.002,00	37.293.888.820,00	6.991.116.182,00	18,74
Gedung dan Bangunan	71.382.249.738,00	70.841.354.266,00	540.895.472,00	0,76
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.530.800.628,00	3.530.800.628,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	881.200.036,00	741.191.281,00	140.008.755,00	18,88
Kontruksi Dalam Pengerjaan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(46.217.320.599,00)	(41.612.505.843,00)	(4.604.814.756,00)	11,06
Jumlah Aset Tetap	121.079.324.205,00	118.012.118.552,00	3.067.205.653,00	2,59
Aset Lainnya				
Aset Tak Berwujud	2.719.020.798,00	2.330.034.798,00	388.986.000,00	16,69
Aset Lain-lain	29.955.100,00	0,00	29.955.100,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(29.955.100,00)	0,00	(29.955.100,00)	0,00
Jumlah Aset Lainnya	2.719.020.798,00	2.330.034.798,00	388.986.000,00	16,69
Jumlah Aset	125.163.735.256,00	121.389.266.315,00	3.774.468.941,00	3,10
Kewajiban				
Utang kepada Pihak Ketiga	164.764.894,00	5.850.454,00	158.914.440,00	2.716,27
Pendapatan di terima di muka	72.900.667,00	10.512.664,00	62.388.003,00	593,45
Pendapatan Yang Ditangguhkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	31.509.274,00	(31.509.274,00)	(100,00)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	237.665.561,00	47.872.392,00	189.793.169,00	396,45
Jumlah Kewajiban	237.665.561,00	47.872.392,00	189.793.169,00	396,45
Ekuitas Dana				
Ekuitas	124.926.069.695,00	121.341.393.923,00	3.584.675.772,00	2,95
Ekuitas Dana	124.926.069.695,00	121.341.393.923,00	3.584.675.772,00	2,95
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	125.163.735.256,00	121.389.266.315,00	3.774.468.941,00	3,10

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2015	2014	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	145.209.092,00	0,00	145.209.092,00	~
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	145.209.092,00	0,00	145.209.092,00	~
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	19.719.620.825,00	0,00	19.719.620.825,00	~
Beban Persediaan	1.624.893.266,00	0,00	1.624.893.266,00	~
Beban Barang dan Jasa	49.482.027.170,00	0,00	49.482.027.170,00	~
Beban Pemeliharaan	3.713.967.394,00	0,00	3.713.967.394,00	~
Beban Perjalanan Dinas	36.658.081.118,00	0,00	36.658.081.118,00	~
Beban Penyusutan & Amortisasi	5.017.532.143,00	0,00	5.017.532.143,00	~
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	116.216.121.916,00	0,00	116.216.121.916,00	~
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(116.070.912.824,00)	0,00	(116.070.912.824,00)	~
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	~
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(12.841.783,00)	0,00	(12.841.783,00)	~
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	14.941.783,00	0,00	14.941.783,00	~
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7.134.600,00	0,00	7.134.600,00	~
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	(7.134.600,00)	0,00	(7.134.600,00)	~
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.807.183,00	0,00	7.807.183,00	~
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(116.063.105.641,00)	0,00	(116.063.105.641,00)	~

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		KENAIKAN / (PENURUNAN)	
	2015	2014	JUMLAH	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	121.341.393.923,00	0,00	121.341.393.923,00	~
SURPLUS/DEFISIT - LO	(116.063.105.641,00)	0,00	(116.063.105.641,00)	~
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(2.193.381,00)	0,00	(2.193.381,00)	~
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain	(2.193.381,00)	0,00	(2.193.381,00)	~
	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	119.649.974.794,00	0,00	119.649.974.794,00	~
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	3.584.675.772,00	0,00	3.584.675.772,00	~
EKUITAS AKHIR	124.926.069.695,00	0,00	124.926.069.695,00	~

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Komisi Yudisial RI yang dibentuk sebagai perwujudan pelaksanaan amanah UUD 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 2004 yang selanjutnya telah direvisi dengan UU Nomor 18 Tahun 2011 merupakan perwujudan reformasi lembaga peradilan dan demokratisasi lembaga peradilan. Prinsip demokrasi secara umum mensyaratkan adanya tindakan "*checks and balances*" untuk menjamin tidak terjadinya dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain dimana dalam kaitan ini adalah dominasi lembaga peradilan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Visi Komisi Yudisial RI adalah terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur dan profesional.

Misi Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan profesional.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien.
- c. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
- d. Mejaga kehormatan, keluhuan martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- e. Menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Rencana aktivitas Komisi Yudisial RI berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai kewenangan dan tugas yang diembannya, secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Aktivitas pengusulan Calon Hakim dan Hakim Agung*; demi

terwujudnya lembaga peradilan yang berkarakter dan berkompentensi melalui pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan penetapan *Calon Hakim dan Hakim Agung* yang memenuhi kriteria karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan amanah penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat lembaga peradilan.

- b. *Aktivitas pengelolaan*; mengupayakan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim sebagai instrument peradilan, baik untuk maksud pengembangan *reward system* maupun untuk pengembangan *checks and balances* demi penegakkan kehormatan dan keluhuran lembaga peradilan.
- c. *Aktivitas pengawasan*; mengupayakan terselenggaranya pola pengawasan perilaku hakim oleh masyarakat melalui mekanisme pengaduan yang cepat dan akurat, dalam upaya penegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan lembaga peradilan dan serta kehati-hatian hakim dalam memutuskan perkara.
- d. *Aktivitas pengendalian*; mengupayakan tindakan cepat dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap perilaku para hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim agar tidak berkembang menjadi ketidakpuasan yang akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga berakibat menurunnya kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan lembaga peradilan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2015 Audited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Yudisial RI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Yudisial RI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Yudisial RI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya

aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

1. X

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan

publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian

Negara/daerah.

- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan

Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Kualitas dan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang

dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan
Rp364.360.735,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp364.360.735,00 atau mencapai 466,19 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp78.157.000,00. Pendapatan Komisi Yudisial RI terdiri dari Pendapatan dari Pemanfaatan BMN dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2015		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real Angg
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0,00	2.100.000,00	~
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	78.157.000,00	140.545.000,00	179,82
Pendapatan Denda	0,00	67.052.095,00	~
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL II	0,00	154.663.640,00	~
Jumlah	78.157.000,00	364.360.735,00	466,19

Realisasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Per 31 Desember Tahun 2015 terdapat yaitu sebesar Rp2.100.000,00. Hasil Bersih Lelang tanggal 27 November 2015 Lelang Non Eksekusi Wajib Barang yang menjadi Milik Negara pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.

Realisasi Pendapatan Pemanfaatan BMN per 31 Desember 2015 sebesar Rp140.545.000,00 atau mencapai 179,82 persen dari estimasi yang telah ditetapkan sebesar Rp78.157.000,00. Kenaikan pendapatan pemanfaatan BMN ini disebabkan adanya:

1. Pendapatan atas Biaya Sewa sebagian halaman Gedung Kantor Komisi Yudisial RI untuk Kios Kantin seluas 69,3m² di Jl.Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat terhitung mulai tanggal 1 September 2015 s.d. 31 Agustus 2016 sesuai Perjanjian Kontrak Nomor PERJ-01/BU.KY/9/2015 sebesar Rp15.769.000,00
2. Pendapatan atas Biaya Sewa Gedung Kantor Komisi Yudisial RI untuk Kantor Kas dan ATM BRI di Jl.Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat terhitung mulai tanggal 02 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp124.776.000,00

Realisasi Pendapatan Denda per 31 Desember 2015 sebesar Rp67.052.095,00 yang merupakan Pendapatan Denda atas Pekerjaan Pengadaan Perangkat Jaringan Teknologi Informasi Tahun 2015. SPM Nomor 01016/KYRI/2015 tanggal 26 November 2015, SP2D Nomor 151331301054462 tanggal 27 November 2015. Sesuai Perjanjian Kerja Nomor 856/Perj/PPK-1.KY/06/2015 Tanggal 22 Juni 2015 dan BAST Nomor 1501-B/BAST/PPBJ.KY/10/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 PT.NEOSYSTEM INTEGRASI.

Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu per 31 Desember 2015 sebesar Rp154.663.640,00. Adapun rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp149.459.150,00
2. Penerimaan kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp4.498.488,00
3. Penerimaan kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp706.002,00.

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014 mengalami kenaikan sebesar 59,54 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2015 dan 2014

<i>Uraian</i>	<i>Realisasi 31 Desember 2015 (Rp)</i>	<i>Realisasi 31 Desember 2014 (Rp)</i>	<i>Naik (Turun) %</i>
<i>Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>~</i>
<i>Pendapatan dari Pemanfaatan BMN</i>	<i>140.545.000,00</i>	<i>15.769.000,00</i>	<i>891,27</i>
<i>Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi</i>	<i>0,00</i>	<i>103.557.600,00</i>	<i>(100,00)</i>
<i>Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah</i>	<i>67.052.095,00</i>	<i>0,00</i>	<i>~</i>
<i>Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu</i>	<i>154.663.640,00</i>	<i>75.981.828,00</i>	<i>203,55</i>
<i>Jumlah</i>	<i>364.360.735,00</i>	<i>195.308.428,00</i>	<i>186,56</i>

Realisasi Belanja
Negara Rp
Rp118.288.383.445,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp118.288.383.445,00 atau 92,19% dari anggaran belanja sebesar Rp128.307.826.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

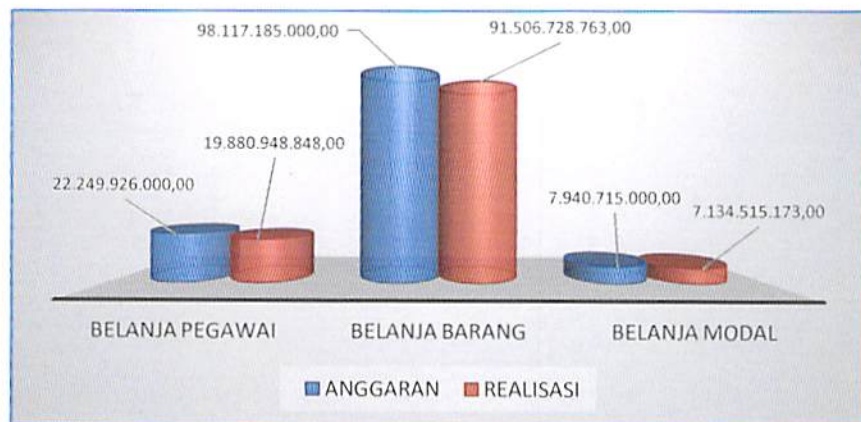
Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2015		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real Angg
Belanja Pegawai	22.249.926.000,00	19.880.948.848,00	89,35
Belanja Barang	98.306.785.000,00	91.506.728.763,00	93,08
Belanja Modal	7.751.115.000,00	7.134.515.173,00	92,05
Total Belanja Kotor	128.307.826.000,00	118.522.192.784,00	92,37
Pengembalian Belanja	0,00	(233.809.339,00)	~
Jumlah	128.307.826.000,00	118.288.383.445,00	92,19

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1

Perbandingan Anggaran dengan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2015



Belanja Pegawai
Rp19.719.620.825,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp19.719.620.825,00 dan Rp14.313.904.560,00. Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 37,77 persen dari 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya kenaikan pangkat/golongan pegawai, pemberian Tunjangan Kinerja serta Perubahan Tarif Gaji Pokok Tahun 2015 untuk PNS, Prajurit TNI dan Anggota Kepolisian RI sesuai

dengan PP Nomor 30,31,32 Tahun 2015 .

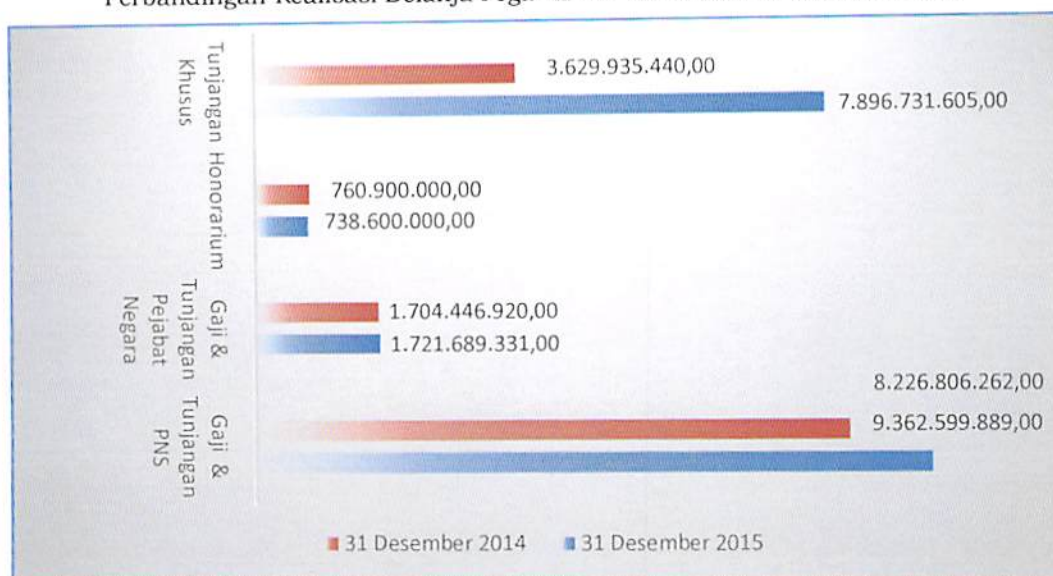
Tabel 6
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2015 dan 2014

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2015 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2014 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	6.366.092.050,00	5.444.451.700,00	16,93
Belanja Pembulatan Gaji PNS	123.470,00	122.437,00	0,84
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	332.690.177,00	284.669.881,00	16,87
Belanja Tunj. Anak PNS	76.128.660,00	63.670.674,00	19,57
Belanja Tunj. Struktural PNS	721.180.000,00	715.030.000,00	0,86
Belanja Tunj. Fungsional PNS	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00
Belanja Tunj. PPh PNS	138.495.385,00	113.157.890,00	22,39
Belanja Tunj. Beras PNS	326.273.000,00	294.911.680,00	10,63
Belanja Uang Makan PNS	1.016.422.000,00	949.642.000,00	7,03
Belanja Tunjangan Umum PNS	372.340.000,00	348.280.000,00	6,91
Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	398.580.000,00	398.580.000,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	1.200,00	1.200,00	0,00
Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	39.858.000,00	39.858.000,00	0,00
Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00
Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	1.079.000.000,00	1.079.000.000,00	0,00
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	172.192.131,00	154.949.720,00	11,13
Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	18.408.000,00	18.408.000,00	0,00
Belanja Uang Honor Tetap	738.600.000,00	760.900.000,00	(2,93)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	8.058.044.775,00	3.629.935.440,00	121,99
Jumlah Belanja Bruto	19.880.948.848,00	14.322.088.622,00	38,81
Pengembalian Belanja Pegawai	(161.328.023,00)	(8.184.062,00)	1.871,25
Jumlah Belanja Netto	19.719.620.825,00	14.313.904.560,00	37,77

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 2

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2015 dan 2014



Belanja Barang
Rp91.434.247.447,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp91.434.247.447,00 dan Rp59.076.072.149,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 54,77 % dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2014.

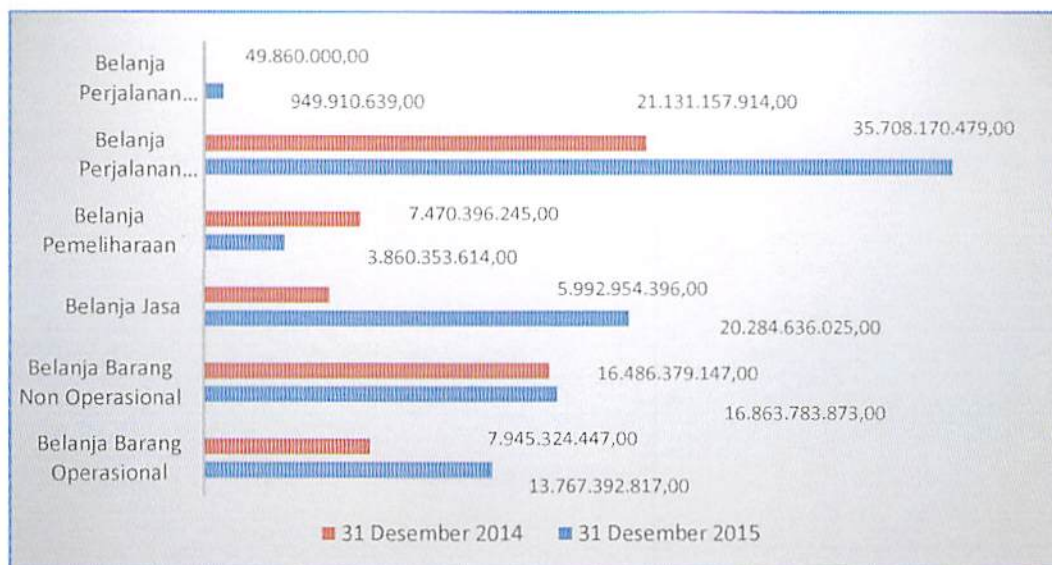
Tabel 7
Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2015 dan 2014

Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)	Naik/ (Turun)
Belanja Barang Operasional	13.769.719.817,00	7.945.324.447,00	73,31
Belanja Barang Non	16.886.078.873,00	16.486.379.147,00	2,42
Belanja Jasa	20.286.591.025,00	5.992.954.396,00	238,51
Belanja Pemeliharaan	3.860.353.614,00	7.470.396.245,00	(48,32)
Belanja Perjalanan Dinas DN	35.754.074.795,00	21.249.078.442,00	68,26
Belanja Perjalanan Dinas LN	949.910.639,00	49.860.000,00	1.805,16
Realisasi Belanja Barang Bruto	91.506.728.763,00	59.193.992.677,00	54,59
Pengembalian Belanja	(72.481.316,00)	(117.920.528,00)	(38,53)
Realisasi Belanja Barang Netto	91.434.247.447,00	59.076.072.149,00	54,77

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 3

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2015 dan 2014



Belanja Modal

Rp7.134.515.173,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp7.134.515.173,00, mengalami kenaikan sebesar 213,17 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.278.175.475,00.

Tabel 8

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2015 dan 2014

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2015 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2014 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.651.038.896,00	1.968.519.475,00	136,27
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1.399.425.900,00	0,00	~
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	726.984.672,00	244.800.000,00	196,97
Belanja Modal Lainnya	357.065.705,00	64.856.000,00	450,55
Jumlah Belanja Bruto	7.134.515.173,00	2.278.175.475,00	213,17
Pengembalian Belanja	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Jumlah Belanja Netto	7.134.515.173,00	2.278.175.475,00	213,17

Komposisi perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 4

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2015 dan 2014



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014

Keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Uang Tunai di Brankas	0,00	0,00
Uang direkening Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Uang Muka Kegiatan Biro/Pusat	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp35.764.346,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2014 merupakan sisa Dana Operasional Pimpinan (DOP) dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial, namun sampai dengan tanggal pelaporan masih belum disetor ke Kas Negara karena terdapat beberapa kendala dalam proses penyetoran, yaitu terdapat NPWP dan nama Wajib Pajak yang salah karena perubahan identitas wajib pajak sehingga belum bisa diproses lebih lanjut.

Selama periode semester I tahun 2015, Bendahara Pengeluaran telah melakukan penyetoran sisa Dana Operasional Pimpinan KY dan pajak ke Kas Negara sebesar Rp35.764.346,00.

**Belanja Dibayar
Dimuka
Rp674.113.259,00**

C.3 Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp674.113.259,00 dan Rp562.100.085,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Adapun rincian Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp58.666.667,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2015. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp88.000.000,00 sesuai Kontrak Nomor 1212/SPK/PPK-7.KY/09/2015 Tanggal 01-09-2015 dan BAST Nomor 1212-B/BAST/PPBJ.KY/09/2015 Tanggal 02-09-2015.
2. Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp65.185.185,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan TA. 2015. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp97.777.778,00 sesuai Kontrak Nomor 1211/SPK/PPK-7.KY/09/2015 Tanggal 01-09-2015 dan BAST Nomor 1211-B/BAST/PPBJ.KY/09/2015 Tanggal 02-09-2015.
3. Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp48.888.889,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur TA. 2015. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp73.333.333,00 sesuai Kontrak Nomor 1214/SPK/PPK-7.KY/09/2015 Tanggal 01-09-2015 dan BAST Nomor 1214-B/BAST/PPBJ.KY/09/2015 Tanggal 02-09-2015.
4. Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp48.888.889,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2015. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp73.333.333,00 sesuai Kontrak Nomor 1217/SPK/PPK-7.KY/09/2015 Tanggal 01-09-2015 dan BAST

Handwritten signature

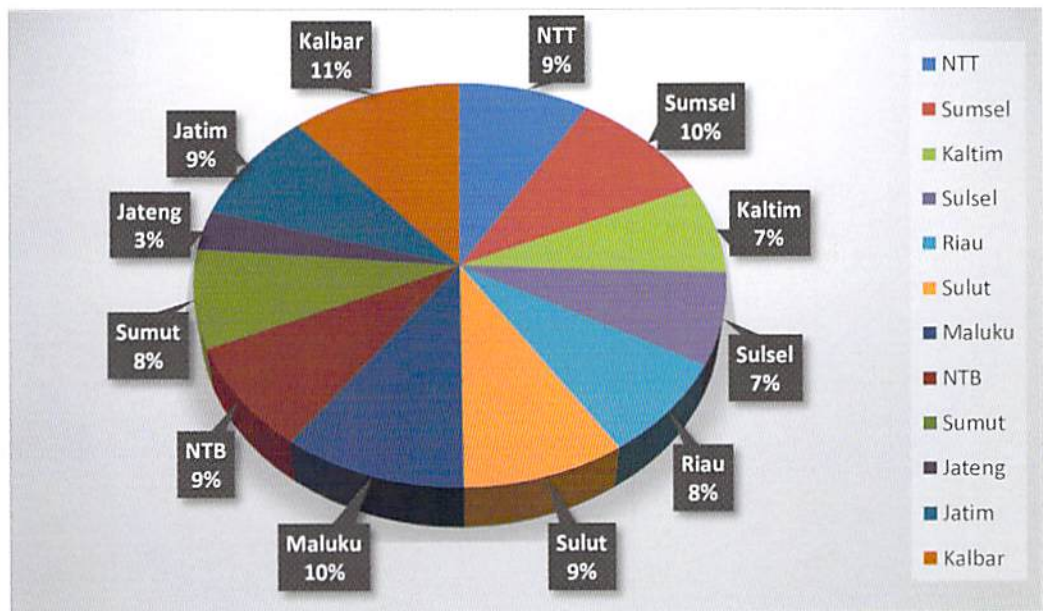
Nomor 1217-B/BAST/PPBJ.KY/09/2015 Tanggal 01-09-2015

5. Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp52.962.963,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Pekanbaru Provinsi Riau TA. 2015. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp79.444.444,00 sesuai Kontrak Nomor 1216/SPK/PPK-7.KY/09/2015 Tanggal 01-09-2015 dan BAST Nomor 1216-B/BAST/PPBJ.KY/09/2015 Tanggal 02-09-2015
6. Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp61.355.555,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara TA. 2015. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp92.033.333,00 Sesuai Kontrak Nomor 1215/SPK/PPK-7.KY/09/2015 Tanggal 01-09-2015 dan BAST Nomor 1215-B/BAST/PPBJ.KY/09/2015 Tanggal 02-09-2015.
7. Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp68.750.000,00,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Ambon Provinsi Maluku TA. 2015. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp91.666.667,00 sesuai Kontrak Nomor 1336/SPK/PPK-7.KY/10/2015 Tanggal 01 Oktober 2015 dan BAST Nomor 1376-B/BAST/PPBJ.KY/10/2015 Tanggal 05 Oktober 2015.
8. Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp57.037.333,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat TA. 2015. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp85.556.000,00 sesuai Kontrak Nomor 1219/SPK/PPK-7.KY/09/2015 Tanggal 01 September 2015 dan BAST Nomor 1219-B/BAST/PPBJ.KY/09/2015 Tanggal 02 September 2015.
9. Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp52.962.963,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara TA. 2015. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp79.444.444,00 sesuai Kontrak Nomor 1213/SPK/PPK-7.KY/09/2015 Tanggal 01 September 2015 dan BAST Nomor 1213-B/BAST/PPBJ.KY/09/2015 Tanggal 02 September 2015.
10. Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp21.592.593,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah TA. 2015. Pembayaran

Belanja Barang sebesar Rp64.777.778,00 sesuai Kontrak Nomor 1220/SPK/PPK-7.KY/09/2015 Tanggal 01 September 2015 dan BAST Nomor 1220-B/BAST/PPBJ.KY/09/2015 Tanggal 02 September 2015.

11. Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp61.433.333,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur TA. 2015. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp92.150.000,00 sesuai Kontrak Nomor 1218/SPK/PPK-7.KY/09/2015 Tanggal 01-09-2015 dan BAST Nomor 1218-B/BAST/PPBJ.KY/09/2015 Tanggal 02-09-2015.
12. Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp76.388.889,00 terkait Pengadaan Langsung Sewa Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat TA. 2015. Pembayaran Belanja Barang sebesar Rp91.666.667 sesuai Kontrak Nomor 1482/SPK/PPK-7/10/2015 Tanggal 30-10-2015 dan BAST Nomor 1511-B/BAST/PPBJ.KY/11/2015 Tanggal 01-11-2015.

Grafik 5
 Prosentase Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2015
 Terkait Dengan Pembayaran Sewa Kantor Penghubung



Piutang Bukan Pajak
 Rp4.198.210.301,00

C.4 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp4.198.210.301,00 dan Rp4.198.210.301,00 yang merupakan hak atau pengakuan

4.X

pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Saldo Piutang Bukan Pajak berasal dari hasil pemeriksaan khusus APIP KYRI atas kelebihan pembayaran ULP & ULS periode Mei s.d Desember 2009; 2010; 2011; 2012 dan Januari s.d Maret 2013. Atas hasil pemeriksaan khusus tersebut, Sekretaris Jenderal telah melimpahkan penanganan selanjutnya kepada pihak berwajib dalam hal ini Kejaksaan Agung melalui surat Nomor 213/SET.KY/01/2014 tanggal 27 Januari 2014 dan sampai saat ini masih dalam proses oleh pihak yang berwajib.

Selama Tahun 2014 Komisi Yudisial menerima Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp103.819.940,00 sehingga saldo per 31 Desember 2014 menjadi Rp4.198.210.301,00.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih – Piutang
Jangka Pendek
Rp(4.198.210.301,00)*

C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp(4.198.210.301,00) dan Rp(4.198.210.301,00).

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Komisi Yudisial melakukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak dikarenakan terdapat pertimbangan kemungkinan tidak dapat diterimanya pembayaran atas piutang tersebut dimasa datang.

Pertimbangan tersebut berdasarkan atas:

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.pst. tanggal 24 Nopember 2014.
2. Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 02/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 03 Maret 2015.
3. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 18 sebagai berikut:
 - 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
 - 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
4. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana

penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Persediaan

Rp691.276.994,00

C.6 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp691.276.994,00 dan Rp449.248.534,00.

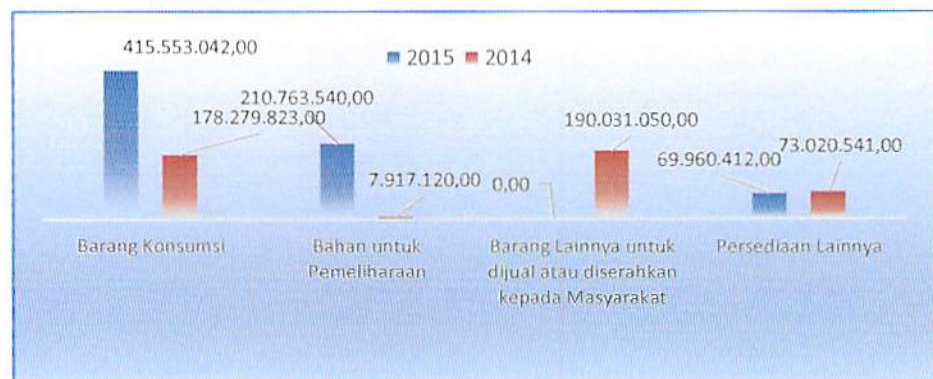
Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014

No	Jenis	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
1	Barang Konsumsi	415.553.042,00	178.279.823,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	210.763.540,00	7.917.120,00
3	Suku Cadang	0,00	0,00
4	Barang Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	190.031.050,00
5	Persediaan Lainnya	64.960.412,00	73.020.541,00
Jumlah		691.276.994,00	449.248.534,00

Grafik 6

Perbandingan Persediaan Per 31 Desember 2015 dan 2014



Tanah

Rp47.188.389.400,00

C.7 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp47.188.389.400,00 dan Rp47.188.389.400,00. Tidak terdapat perubahan aset tetap berupa tanah.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2015 terdiri dari:

Tabel 11
Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2015

No	Kode	Luas	Nilai (Rp)
1	2.01.01.04.001	5.780 m ²	47.188.389.400,00
Jumlah		5.780 m ²	47.188.389.400,00

Tanah seluas 5.780 m² terletak di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta 10450, Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Peralatan dan Mesin

Rp44.285.005.002,00

C.8 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 November 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp44.285.005.002,00 dan Rp37.293.888.820,00. Nilai Netto Peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 sebesar Rp10.687.651.709,00 setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp33.597.353.293,00

Tabel 12
Mutasi Tambah/Kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2014	Rp	37.293.888.820,00
Mutasi Tambah:		
Pembelian dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	5.828.859.400,00
Pembelian dari Belanja Modal Lainnya	Rp	259.426.950,00
Hibah Barang	Rp	1.206.183.436,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	96.522.000,00
Mutasi Kurang :		
Penghentian dari Penggunaan	Rp	369.920.504,00
Aset tidak diketahui keberadaannya	Rp	29.955.100,00
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	44.285.005.002,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015	Rp	(33.597.353.293,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2015	Rp	10.687.651.709,00

1. Pembelian yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.847.567.996,00, Nilai Ekstrakomptabel sebesar Rp18.708.596,00 sehingga Nilai Kapitalisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin kedalam Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.828.859.400,00.
2. Reklasifikasi pengakuan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal Lainnya sebesar Rp259.426.950,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Penyelenggaraan dan Pengelolaan *Pers Conference (Fiber Optic)* Tahun Anggaran 2015 sesuai SPK Nomor 01/SPK/PPK-4.KY/08/2015 tanggal 05 Agustus 2015 sebesar Rp81.427.500,00 an. PT. Mitra Buana Komputindo dengan SP2D Nomor 151331301041310 tanggal 08 Oktober 2015
 - b) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Penyelenggaraan dan Pengelolaan *Pers Conference* Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI Tahun 2015 sesuai SPK Nomor 05/Perj/PPK-4.KY/11/2015 tanggal 09 November 2015 sebesar Rp118.469.600,00 an. PT. Bhinneka Mentari Dimensi dengan SP2D Nomor 151331301070627 tanggal 28 Desember 2015
 - c) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung dan Validasi Data Primer Hakim Tahun 2015 sesuai SPK Nomor 08/SPK/PPK-4.KY/11/2015 tanggal 12 November 2015 sebesar Rp59.529.850,00 an. CV Maestro Solusindo dengan SP2D Nomor 151331302016171 tanggal 29 Desember 2015
3. Penerimaan Hibah Langsung berupa Peralatan dan Mesin dari *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* berupa 5 set Alarm Rekam Audio Video (ARAV) senilai Rp1.206.183.436,00. Hibah tersebut telah didistribusikan Hibah untuk Kantor Pusat Komisi Yudisial dan Kantor Penghubung Komisis Yudisial di Medan, Semarang, Surabaya, Samarinda, Makassar dan Mataram. Penerimaan Hibah Langsung berupa Peralatan dan Mesin berdasarkan:
 - a) Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/

- Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) Nomor 0538/PR.8/2015 tanggal 04 Desember 2015
- b) Nomor Register/Grant ID 2D76N3G8/LBAU0097.
 - c) Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 01/BAST/KY.SET/04/2015 tanggal 20 April 2015
4. Reklasifikasi pengakuan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang sebesar RP96.522.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sesuai SPK Nomor 1206/SPK/PPK-7.KY/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp69.300.000,00 an. CV.Laskar dengan SP2D Nomor 151331301039995 tanggal 05 Oktober 2015
 - b) Pengadaan *Crimp Tool* dan *TP-Link* sebesar Rp2.850.000,00 dalam rangka belanja bahan kebutuhan instalasi *Web-Conference* dengan *V-Cube* Wilayah Penghubung Medan dan Semarang sesuai Kuitansi Nomor K.3746 tanggal 08 Maret 2015
 - c) Pengadaan *Crimp Tool* dan *TP-Link* sebesar Rp2.850.000,00 dalam rangka belanja bahan kebutuhan instalasi *Web-Conference* dengan *V-Cube* Wilayah Penghubung Samarinda dan Makassar sesuai Kuitansi Nomor K.3747 tanggal 08 Maret 2015
 - d) Pengadaan *Crimp Tool* dan *TP-Link* sebesar Rp2.850.000,00 dalam rangka belanja bahan kebutuhan instalasi *Web-Conference* dengan *V-Cube* Wilayah Penghubung Surabaya dan Mataram sesuai Kuitansi Nomor K.3748 tanggal 08 Maret 2015
 - e) Pengadaan *Crimp Tool* dan *TP-Link* sebesar Rp9.336.000,00 dalam rangka belanja bahan kebutuhan instalasi *Web-Conference* dengan *V-Cube* Wilayah Penghubung Pekanbaru dan Manado sesuai Kuitansi Nomor K.12184 tanggal 09 Juni 2015
 - f) Pengadaan *Crimp Tool* dan *TP-Link* sebesar Rp9.336.000,00 dalam rangka belanja bahan kebutuhan instalasi *Web-Conference* dengan *V-Cube* Wilayah Penghubung Kupang dan Palembang sesuai Kuitansi Nomor K.12191 tanggal 09 Juni 2015

Sedangkan Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2015 terdiri dari:

1. Peralatan dan Mesin yang telah dihentikan dari penggunaan disebabkan karena Rusak Berat senilai Rp369.920.504,00 yang terdiri dari:
 - a) Satu Unit Gerobak Dorong senilai Rp1.835.000,00
 - b) Dua Unit Alat Penghancur Kertas senilai Rp5.350.500,00
 - c) Satu Unit LCD Projector/Infocus senilai Rp7.350.000,00
 - d) Tiga Unit Meja Kerja Kayu senilai Rp4.109.820,00
 - e) Delapan Unit Kursi Besi/Metal senilai Rp15.558.500,00
 - f) Tiga Unit Telepon Listrik senilai Rp1.687.500,00
 - g) Dua Unit Televisi senilai Rp4.975.000,00
 - h) Dua Unit Tape Recorder senilai Rp1.547.000,00
 - i) Tiga Unit Dispenser senilai Rp4.768.000,00
 - j) Dua Unit Handycam senilai Rp15.760.584,00
 - k) Empat Unit Voice Recorder senilai Rp9.724.000,00
 - l) Satu Unit Camera Film senilai Rp2.745.000,00
 - m) Satu Unit Lensa Kamera senilai Rp8.100.000,00
 - n) Satu Unit Camera Digital senilai Rp1.272.000,00
 - o) Lima Unit Mesin Facsimile senilai Rp9.556.000,00
 - p) Dua Puluh Unit P.C Unit senilai Rp208.247.000,00
 - q) Dua Unit Notebook senilai Rp28.520.000,00
 - r) Sepuluh Unit Printer senilai Rp35.074.600
 - s) Dua Unit Scanner senilai Rp3.740.000,00
2. Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp29.955.100,00 yang terdiri dari:
 1. Satu Unit Televisi senilai Rp5.250.000,00
 2. Tiga Unit Jam Elektronik senilai Rp924.000,00
 3. Tiga Unit AC senilai Rp22.397.100,00
 4. Satu Unit Dispenser senilai Rp1.384.000,00

Gedung dan Bangunan
Rp71.382.249.738,00

C.9 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp71.382.249.738,00 dan Rp70.841.354.266,00. Nilai Netto Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 sebesar Rp62.199.287.285,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp9.182.962.453,00.

Tabel 13
Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2014	Rp 70.841.354.266,00
Mutasi Tambah: Pembelian	Rp 540.895.472,00
Saldo per 31 Desember 2015	Rp 71.382.249.738,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015	Rp (9.182.962.453,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2015	Rp 62.199.287.285,00

Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2015 berupa Pengembangan Aset Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pembuatan Toilet Bagi Penyandang Difabilitas dan Pembuatan Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Komisi Yudisial sebesar Rp173.500.000,00 dengan SP2D Nomor 151331301038361 tanggal 25 September 2015
2. Pekerjaan Pengadaan Langsung Paket Pekerjaan Penambahan Ruang Kerja Staf Verifikasi dan Perbaikan Ruang Rapat pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim di Lantai 2 Gedung Komisi Yudisial senilai Rp65.208.000,00 dengan SP2D Nomor 151331301054485 tanggal 27 November 2015
3. Pekerjaan Pengadaan Langsung Jasa Pekerjaan Perapihan Con Blok pada Gedung Kantor Komisi Yudisial senilai Rp34.375.000,00 dengan SP2D Nomor 151331303022672 tanggal 27 November 2015
4. Pekerjaan Pengadaan Langsung Jasa Kontruksi Paket Pekerjaan Pembuatan Ruang Sidang dan Ruang Periksa di Lantai 2 (dua) Gedung Komisi Yudisial senilai Rp167.425.000,00 dengan SP2D Nomor 151331301066932 tanggal 17 Desember 2016
5. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Wallpaper dan Karpet senilai Rp100.387.472,00 dengan SP2D Nomor 151331302013921 tanggal 17 Desember 2016

Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp3.530.800.628,00

C.10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp3.530.800.628,00 dan Rp3.530.800.628,00. Nilai Netto Jalan, Irigasi dan Bangunan per 31 Desember 2015 sebesar Rp93.795.775,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp3.437.004.853,00.

Tabel 14

Mutasi Tambah/Kurang Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2014	Rp 3.530.800.628,00
Mutasi Tambah: Pembelian	Rp 0,00
Mutasi Kurang : Penghentian dari Penggunaan	Rp 0,00
Saldo per 31 Desember 2015	Rp 3.530.800.628,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015	Rp(3.437.004.853,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2015	Rp 93.795.775,00

Aset Tetap Lainnya
Rp881.200.036,00

C.11 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp881.200.036,00 dan Rp741.191.281,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigas dan jaringan.

Tabel 15

Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2014	Rp 741.191.281,00
Mutasi Tambah: Pembelian	Rp 97.638.755,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp 42.370.000,00
Saldo per 31 Desember 2015	Rp 881.200.036,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015	Rp 0,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2015	Rp 881.200.036,00

1. Pembelian yang bersumber dari Belanja Modal Lainnya senilai Rp97.638.755,00 yaitu berupa Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2015 dengan SP2D Nomor 151331302015858 tanggal 28 Desember 2015
2. Kapitalisasi dari Belanja Barang senilai Rp42.370.000,00 yaitu

berupa Pekerjaan Diorama Ruang Persidangan dalam Rangka Kampanye *Judicial Education* pada Acara Pameran Anti Korupsi se Dunia yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2015 dengan SP2D Nomor 151331302015953 tanggal 28 Desember 2015

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp29.000.000,00

C.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp29.000.000,00 dan Rp29.000.000,00 yang merupakan pekerjaan perencanaan pembangunan atap lapangan tenis sesuai SPK Nomor 176/SPK/PPK-1.KY/02/2013 tanggal 22 Februari 2013 dan BAST Nomor 176-B/BAST/PPBJ.KY/03/2013 tanggal 22 Maret 2013.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(46.217.320.599,00)

C.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah (Rp46.217.320.599,00) dan (Rp41.612.505.843,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tabel 16

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	47.188.389.400,00	0,00	47.188.389.400,00
2	Peralatan dan Mesin	44.285.005.002,00	(33.597.353.293,00)	10.687.651.709,00
3	Gedung dan Bangunan	71.382.249.738,00	(9.182.962.453,00)	62.199.287.285,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.530.800.628,00	(3.437.004.853,00)	93.795.775,00
5	Aset Tetap Lainnya	881.200.036,00	0,00	881.200.036,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
	Jumlah	167.296.644.804,00	(46.217.320.599,00)	121.079.324.205,00

Aset Tak Berwujud
Rp2.719.020.798,00

C.14 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp2.719.020.798,00 dan Rp2.330.034.798,00 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Komisi Yudisial berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Tabel 17
Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap per 31 Desember 2015

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2014	Rp 2.330.034.798,00
Mutasi Tambah: Pembelian	Rp 388.986.000,00
Mutasi Kurang :	Rp 0,00
Saldo per 31 Desember 2015	Rp 2.719.020.798,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015	Rp (29.955.100,00)
Nilai Buku Per 31 Desember 2015	Rp 2.689.065.698,00

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2015 senilai Rp388.986.000,00 berupa:

1. Pekerjaan Pengadaan Perangkat Jaringan Teknologi Informasi Tahun 2015 senilai Rp171.501.000,00 dengan SP2D Nomor 151331301054462 tanggal 27 November 2015
2. Pekerjaan Pengadaan Langsung SQL Server 2014 senilai Rp27.885.000,00 dengan SP2D Nomor 151331301058812 tanggal 07 Desember 2015
3. Pekerjaan Pengadaan Langsung Pengadaan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai senilai Rp189.600.000,00 dengan SP2D Nomor 151331302009996 tanggal 10 November 2015

Aset Lain-lain
Rp29.955.100,00

C.15 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp29.955.100,00 dan Rp0,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun Peralatan dan

Mesin yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp29.955.100,00 yang terdiri dari:

1. Satu Unit Televisi senilai Rp5.250.000,00
2. Tiga Unit Jam Elektronik senilai Rp924.000,00
3. Tiga Unit AC senilai Rp22.397.100,00
4. Satu Unit Dispenser senilai Rp1.384.000,00

Akumulasi Penyusutan
Aset Lainnya
(Rp29.955.100,00)

C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah (Rp29.955.100,00) dan (Rp0,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Tabel 18

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2015

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	2.719.020.798,00	0,00	2.719.020.798,00
2	Aset Lain-lain	29.955.100,00	(29.955.100,00)	0,00
	Jumlah	2.748.975.898,00	(29.955.100,00)	2.719.020.798,00

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp164.764.894,00

C.17 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp164.764.894,00 dan Rp5.850.454,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Sampai dengan 31 Desember 2015 terdapat kewajiban yang belum terselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Biaya Langganan Telepon untuk Kantor Komisi Yudisial RI bulan Desember Tahun 2015 sebesar Rp12.294.303,00.
2. Biaya Langganan Listrik untuk Kantor Komisi Yudisial RI bulan Desember Tahun 2015 sebesar Rp132.127.289,00.

3. Biaya Langganan Air untuk Kantor Komisi Yudisial RI bulan Desember Tahun 2015 sebesar Rp3.228.722,00
4. Biaya Langganan Listrik, Telepon, Internet serta Air dan Gas untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial sebesar Rp17.114.580,00

*Pendapatan Diterima
di Muka
Rp72.900.667,00*

C.18 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp72.900.667,00 dan Rp10.512.664,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan dari pemanfaatan BMN yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp72.900.667,00 dan Rp10.512.664,00. Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sbb:

1. Pendapatan diterima dimuka atas sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial sebesar Rp 10.512.667,00. Pendapatan tersebut merupakan sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial yang digunakan untuk *Counter/Kios* kantin seluas 69m² dengan jangka waktu 12 bulan, terhitung mulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Sebagian Halaman Untuk *Counter/Kios* kantin antara Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI dengan Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia (KPKY RI) Nomor PERJ-01/BU.KY/9/2015 sebesar Rp15.769.000,00, sedangkan atas barang/jasa selama 8 bulan ke depan (Januari s.d Agustus 2016) masih belum diserahkan;
2. Pendapatan diterima dimuka atas sewa ruang Gedung Komisi Yudisial sebesar Rp62.388.000,00. Pendapatan tersebut merupakan pemanfaatan ruangan gedung KYRI seluas 45.65 m² yang digunakan sebagai Kantor Cabang Pembantu BRI dan ruang ATM BRI dengan jangka waktu 24 bulan sesuai

Perjanjian Kontrak Nomor PERJ-01/SET.KY/1/2015 sebesar Rp124.776.000,00, dihitung mulai tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016, sedangkan atas barang/jasa selama 12 bulan ke depan (Januari s.d Desember 2016) masih belum diserahkan.

*Pendapatan Yang
Ditanggihkan Rp0,00*

C.19 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 dan Rp31.509.274,00

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek sebagaimana tersebut pada Utang kepada pihak ketiga dan pendapatan diterima dimuka.

Termasuk di dalam Utang Jangka Pendek Lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain, utang biaya yang timbul terkait penerimaan jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan, dan Dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak per tanggal neraca.

Utang Jangka Pendek Lainnya berasal dari pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial, namun sampai dengan tanggal pelaporan masih ada kendala dalam proses penyetoran, sehingga pajak tersebut belum diterima oleh Negara.

*Ekuitas
Rp124.926.069.695,00*

C.20 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp124.926.069.695,00 dan Rp121.341.393.923,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBPNP
Rp145.209.092,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan penerimaan bukan pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp145.209.092,00 dan Rp0,00. Pendapatan penerimaan bukan pajak terdiri:

1. Pendapatan Operasional atas sewa sebagian halaman gedung Komisi Yudisial RI sebesar Rp5.256.333,00. Pendapatan tersebut merupakan Biaya Sewa sebagian halaman Gedung Kantor Komisi Yudisial RI untuk Kios Kantin seluas 69,3m² di Jl.Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat terhitung mulai tanggal 1 September 2015 s.d. 31 Agustus 2016 sesuai Perjanjian Kontrak Nomor PERJ-01/BU.KY/9/2015 sebesar Rp15.769.000,00, sedangkan atas barang/jasa selama 8 bulan ke depan (Januari s.d Agustus 2016) masih belum diserahkan.
2. Pendapatan Operasional atas sewa sebagian halaman gedung Komisi Yudisial RI sebesar Rp10.512.664,00. Pendapatan tersebut merupakan Biaya Sewa sebagian halaman Gedung Kantor Komisi Yudisial RI untuk Kios Kantin seluas 69,3m² di Jl.Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat terhitung mulai tanggal 1 September 2014 s.d. 31 Agustus 2015 sesuai Perjanjian Kontrak Nomor PERJ-01/BU.KY/8/2014 sebesar Rp15.769.000,00, sedangkan atas barang/jasa selama 4 bulan (September s.d Desember 2015) telah diserahkan.
3. Pendapatan Operasional atas sewa gedung kantor Komisi Yudisial RI sebesar Rp62.388.000,00. Pendapatan tersebut merupakan Biaya Sewa Gedung Kantor Komisi Yudisial RI untuk Kantor Kas dan ATM BRI di Jl.Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat terhitung mulai tanggal 02 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2016 Sesuai Perjanjian Kontrak Nomor PERJ-01/SET.KY/1/2015 sebesar Rp124.776.000,00, sedangkan atas barang/jasa selama 12 bulan ke depan (Januari s.d Desember 2016) masih belum diserahkan.
4. Denda keterlambatan atas pekerjaan pengadaan belanja modal sebesar Rp67.052.095,00. Pekerjaan tersebut merupakan pengadaan perangkat jaringan teknologi informasi. SPM Nomor 01016/KYRI/2015 tanggal 26 November 2015, SP2D Nomor 151331301054462 tanggal 27 November 2015 sebesar

Rp1.341.041.900,00. Sesuai Perjanjian Kerja Nomor 856/Perj/PPK-1.KY/06/2015 Tanggal 22 Juni 2015 dan BAST Nomor 1501-B/BAST/PPBJ.KY/10/2015 Tanggal 30 Oktober 2015.

Beban Pegawai

Rp19.719.620.825,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp19.719.620.825,00 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 19

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.362.599.889,00	0,00	~
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.721.689.331,00	0,00	~
Belanja Honorarium	738.600.000,00	0,00	~
Belanja Tunj.Khusus	7.896.731.605,00	0,00	~
Jumlah	19.719.620.825,00	0,00	~

Grafik 7

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2015



Beban Persediaan
Rp1.624.893.266,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.624.893.266,00 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

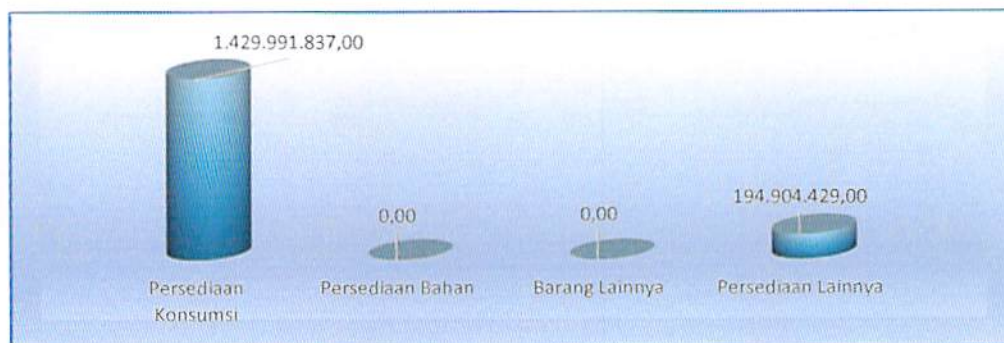
Tabel 20

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.429.991.837,00	0,00	~
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00	~
Beban Persediaan Suku Cadang	0,00	0,00	~
Barang Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	
Beban Persediaan Lainnya	194.901.429,00	0,00	~
Jumlah Beban Persediaan	1.624.893.266,00	0,00	~

Grafik 8

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2015



Beban Barang dan Jasa
Rp49.482.027.170,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp49.482.027.170,00 dan Rp0,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 21

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Barang Operasional	11.884.338.498,00	0,00	~
Beban Barang Non Operasional	16.923.596.373,00	0,00	~
Beban Jasa	20.655.383.703,00	0,00	~
Beban Aset Ekstrakomptabel	18.708.596,00		
Jumlah	49.482.027.170,00	0,00	~

Grafik 9

Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2015



Tahun Anggaran 2015 Komisi Yudisial menerima Hibah Langsung berupa Hibah Jasa dari *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* senilai Rp519.768.648,00 berdasarkan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) Nomor 0539/PR.8/2015 tanggal 04 Desember 2015 dengan Nomor Register/*Grant ID* 2D76N3G8/LBAU0097. Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 02/BAST/KY.SET/07/2015 tanggal 27 Juli 2015. Hibah Jasa tersebut berupa:

1. Kepesertaan dalam Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemantau KY dalam Pemenuhan Hak atas Peradilan yang *Fair* bagi Penyandang Disabilitas, yang dilaksanakan di Mataram tanggal 24 s.d. 27 Maret 2015 senilai Rp217.652.740,00
2. Lokakarya Evaluasi Pemantauan dalam Penggunaan ARAV, yang dilaksanakan di Sentul, Bogor tanggal 18 s.d. 21 Mei 2015 senilai Rp302.115.908,00

Beban Pemeliharaan
Rp3.713.967.394,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp3.713.967.394,00 dan Rp0,00. Beban

Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.223.190.150,00	0,00	~
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	88.040.450,00	0,00	~
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.402.736.794,00	0,00	~
Jumlah	3.713.967.394,00	0,00	~

Grafik 10
Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2015



Beban Perjalanan Dinas
Rp36.658.081.118,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp36.658.081.118,00 dan Rp0,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	30.038.333.252,00	0,00	~
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	997.140.000,00	0,00	~
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.330.327.200,00	0,00	~

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.342.370.027,00		~
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	949.910.639,00		~
Jumlah	36.658.081.118,00	0,00	~

Grafik 11

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2015



Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp5.017.532.143,00

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp5.017.532.143,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Rp2.100.100,00

D.8. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.100.000,00 dan Rp0,00. Pendapatan PNBPN di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena pemakaian dan factor usia barang.

*Beban Pelepasan Aset
Non Lancar
(Rp12.841.783,00)*

D.9. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar (Rp12.841.783,00) dan Rp0,00. Beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang bisa meliputi salah satunya berkurangnya asset tetap

*Beban dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya
Rp7.134.600,00*

D.10. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp7.134.600,00 dan Rp0,00. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan Kerugian akibat Persediaan Rusak/Usang.

*Surplus/ (Defisit) - LO
(116.063.105.641,00)*

D.11. Surplus / (Defisit) - LO

Jumlah Surplus / (Defisit)-LO untuk 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar (Rp116.063.105.641,00) dan Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp121.341.393.923,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 1 Januari 2014 adalah sebesar Rp121.341.393.923,00 dan Rp0,00.

Defisit LO

Rp116.063.105.641,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar (Rp116.063.105.641,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar per tanggal 31 Desember 2015 sebesar (Rp2.193.381,00). Saldo tersebut merupakan koreksi lain-lain atas beban tagihan langganan daya jasa bulan Desember 2014 yang dibayarkan pada tahun 2015 senilai (Rp156.857.021,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya langganan listrik untuk kantor Komisi Yudisial di Jakarta sebesar (Rp127.305.550,00)
2. Biaya langganan telepon untuk kantor Komisi Yudisial di Jakarta sebesar (Rp14.982.560,00)
3. Biaya langganan listrik pada enam Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Makassar, Mataram, Medan, Palembang, Samarinda dan Surabaya sebesar (Rp5.978.492,00)
4. Biaya langganan telepon dan internet pada delapan Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Kupang, Manado, Makassar, Mataram, Medan, Palembang, Samarinda dan Surabaya sebesar (Rp8.488.119,00)
5. Biaya langganan air pada Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Medan sebesar (Rp102.300,00)

Selain itu terdapat koreksi lain-lain atas Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran 2014 yang dibayarkan pada Tahun 2015 senilai Rp154.663.640,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp149.459.150,00
2. Penerimaan Kembali Modal Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp4.498.488,00
3. Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp706.002,00

Ekuitas Akhir

Rp124.926.069.695,00

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp124.926.069.695,00 dan Rp121.341.393.923,00

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp2.719.020.798,00 belum dilakukan Amortisasi. Hal ini disebabkan Aplikasi SIMAK BMN UAKPB menyajikan nilai Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2015 sebesar harga perolehan dan belum memperhitungkan Amortisasi.

Aplikasi SIMAK BMN UAKPB belum mengakomodir amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB) karena belum tersedianya fitur tabel masa manfaat atas amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB) dan perhitungan amortisasi dengan masa manfaat terbatas sesuai dengan KMK Nomor 620/KM.6/2015 tentang masa manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud (ATB). Sehingga Komisi Yudisial RI tidak dapat memproses amortisasi atas Aset Tak Berwujud (ATB).